

**OPINI AUDIT BPK-RI DAN SUBSTANSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI SE-PAPUA (STUDI KASUS TAHUN
2020-2021)**

Tsania Elsa Riska, Yohani, M. Fithrayudi Triatmaja

Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukannya otonomi khusus diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka NKRI, namun terdapat masalah tata aliran kerja birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan dana Otsus. Sehingga, dana Otsus masih belum dirasakan oleh masyarakat lokal Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disebabkan adanya ASN yang belum maksimal dalam peningkatan tata kelola keuangan, sehingga berdampak juga terhadap perolehan opini audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan antara Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini WTP dan WDP tahun 2020-2021. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LKPD Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2020-2021. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga terdapat 81 LKPD yang dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis *mann-whitney* dengan program SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan kinerja kemandirian, derajat desentralisasi dan efektivitas, sedangkan variabel efisiensi, belanja operasi, belanja modal dan pertumbuhan tidak terdapat perbedaan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini WTP dan WDP tahun anggaran 2020-2021. Pemerintah hendaknya dapat mengelola keuangan dengan sesuai agar tujuan untuk mensejahterakan rakyat dapat terealisasi.

Kata Kunci : Opini Audit, Rasio Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.